



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 234/HUMAS PMK/IX/2022

Presiden: Nama dan Alamat Jelas, Pusat-Daerah Harus Kompak

Turunkan Kemiskinan Ekstrem 0 persen pada 2024

KEMENKO PMK -- Presiden RI Joko Widodo meminta kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa diturunkan menjadi 0 persen pada tahun 2024. Kepala Negara menegaskan, saat ini telah ada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah padan dengan data Dukcapil.

"Data sudah jelas ada. Di daerah-daerah ada datanya semuanya. Artinya, sasarannya jelas. By name, by address, nama alamat semuanya ada," ujar Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak bersinergi menyelesaikan berbagai aspek kemiskinan ekstrem. Mulai dari intervensi bantuan sosial, intervensi lingkungan, intervensi bangunan fisik rumah, dan juga sarana prasarana air bersih.

"Kalau kita bareng-bareng pusat daerah menuju sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap bareng-bareng. Urusan income pendapatan semuanya digarap bareng-bareng. Sasarannya ada kok jelas. Nama dan alamat. Bansosnya ke sana arahkan. Perbaiki rumah kumuh arahkan ke sana," ujarnya.

Menurut Presiden, dengan telah jelasnya data, maka penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 akan lebih mudah. Asalkan, dia meminta kekompakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik.

"Kalau dulu nama alamatnya gak jelas, sekarang ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng menuju sasaran yang kita inginkan. Saya ingin kita semua kerja konkret bersama-sama," tegas Presiden.

Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data BPS, Maret 2022 adalah sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun. Pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14 % atau 5,8 juta jiwa.

Presiden Jokowi meminta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024. Target itu enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam SDGs yaitu tahun 2030. Setidaknya diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai 0 persen pada 2024.

Sebagai penguatan, pemerintah juga telah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menugaskan 28 Kementerian/Lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Terdapat tiga instrumen kebijakan yang telah dilakukan yakni: Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data P3KE yang padan dengan Dukcapil. Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 telah difokuskan di 212 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemiskinan ekstrem di Indonesia dewasa ini memang jumlahnya relatif kecil. Namun menurutnya, jumlah yang sedikit bukan berarti mudah diatasi. Jumlah yang kecil ini katanya, merupakan kerak dari piramida kemiskinan.

Karenanya, Menko PMK mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara holistik atau menyeluruh. Dia mengatakan, kemiskinan ekstrem tidak hanya ditangani dengan diberi bansos, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan, rumahnya, sanitasinya, air minumannya harus punya akses, dan pendidikan harus terjamin.

"Jadi harus ditangani secara holistik. Tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh," kata Muhadjir.

Menko PMK mengatakan butuh kerja keras bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. "Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut," ujarnya.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**